



Public Policy Analysis Related to Political Factors in Villages Case Study: Kertawinangun Village, Kedawung District

Sri Wulandari^{1*}, Aliyya Malika Rachmah², Selviana Monika³, Dinda Putri Sri Lestari⁴, Alfian Ramdhani⁵, Maftuh Ahnan Sulaiman⁶
Universitas Swadaya Gunung Jati

Corresponding Author: Sri Wulandari swuland02@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Public Policy, Political Factors, Village Administration, Transparency, Community Participation

Received : 24, September

Revised : 26, November

Accepted: 28, January

©2026 Wulandari, Rachmah, Monika, Lestari, Ramdhani, Sulaiman:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



ABSTRACT

This study discusses the impact of political factors on public policy in Kertawinangun Village, Kedawung District, Cirebon Regency. With the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, there have been major changes in village administration, which has provided greater autonomy but also changed the political dynamics in the formulation and implementation of public policy at the village level. This study uses a qualitative method with a case study approach to determine how political factors influence the policy process from the formulation to the implementation stage. The results show that political factors play an important role in the formulation and implementation of policies in Kertawinangun Village. The leadership of the village head, relations with the Village Consultative Body (BPD), local political dynamics, and community participation are the main elements that determine the direction and focus of public policy.

Analisis Kebijakan Publik Terkait Faktor Politik pada Desa Studi Kasus: Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung

Sri Wulandari^{1*}, Aliyya Malika Rachmah², Selviana Monika³, Dinda Putri Sri Lestari⁴, Alfian Ramdhani⁵, Maftuh Ahnan Sulaiman⁶

Universitas Swadaya Gunung Jati

Corresponding Author: Sri Wulandari swuland02@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Faktor Politik, Pemerintahan Desa, Transparansi, Partisipasi Masyarakat

Received : 24, September

Revised : 26, November

Accepted: 28, Januari

©2026 Wulandari, Rachmah, Monika, Lestari, Ramdhani, Sulaiman: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0](#)

[Internasional](#).



ABSTRAK

Penelitian ini membahas dampak faktor politik terhadap kebijakan publik di Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terjadi perubahan besar dalam pengelolaan pemerintahan desa, yang memberikan otonomi lebih luas namun juga mengubah dinamika politik baru dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengetahui bagaimana faktor politik memengaruhi proses kebijakan dari tahap perumusan hingga pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor politik memiliki peran penting dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan di Desa Kertawinangun. Kepemimpinan kepala desa, hubungan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dinamika politik lokal, serta partisipasi masyarakat merupakan elemen utama yang menentukan arah dan fokus kebijakan publik.

PENDAHULUAN

Desa sebagai entitas pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan publik serta pembangunan nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terjadi perubahan signifikan dalam pengelolaan pemerintahan desa yang memberikan otonomi lebih luas bagi desa untuk mengatur dan mengelola kepentingan warganya sendiri (Nurcholis, 2017). Transformasi ini membawa implikasi baru dalam dinamika politik lokal, terutama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik di tingkat desa.

Desa Kertawinangun yang terletak di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu desa yang mengalami dinamika politik lokal terkait dengan pembuatan kebijakan publik. Sebagai bagian dari Kabupaten Cirebon yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan politik yang unik, Desa Kertawinangun menghadapi berbagai tantangan dalam mengubah aspirasi masyarakat menjadi kebijakan publik yang adil dan berdampak positif. Proses pengambilan keputusan di tingkat desa tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis dan administratif, tetapi juga oleh elemen politik yang melibatkan interaksi antara berbagai aktor dan kepentingan (Sutoro Eko, 2014).

Faktor-faktor politik dalam konteks kebijakan publik di tingkat desa meliputi kepemimpinan kepala desa, dinamika hubungan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengaruh elit lokal, serta partisipasi masyarakat dalam proses politik desa. Dinamika politik lokal ini dapat memengaruhi arah dan prioritas kebijakan publik yang dihasilkan, alokasi anggaran desa, serta efektivitas implementasi program-program pembangunan.

Dalam konteks Desa Kertawinangun, proses formulasi kebijakan publik dipengaruhi oleh kondisi politik lokal, termasuk pola interaksi, kompetisi kepentingan, relasi antara pemerintah desa dan BPD, serta partisipasi masyarakat dalam arena politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana faktor-faktor politik mempengaruhi kebijakan dari tahap formulasi hingga implementasi. Memahami pengaruh faktor politik juga sangat penting untuk memastikan efektivitas penggunaan Dana Desa, sehingga kebijakan dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berasal dari pandangan bahwa dinamika politik berpengaruh besar terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik di tingkat desa. Dalam konteks Desa Kertawinangun, Kabupaten Cirebon, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi seberapa besar pengaruh faktor politik terhadap arah dan substansi kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Maschab (2013) yang menyatakan bahwa politik pemerintahan desa di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari hubungan kekuasaan lokal dan kepentingan para aktor politik. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi berbagai tantangan yang muncul dalam implementasi kebijakan yang disebabkan oleh intervensi politik, seperti praktik politik uang dan konflik

kepentingan yang terbukti menghambat pengelolaan pemerintahan desa secara demokratis (Dedihasriadi, 2022).

Selanjutnya, penelitian ini ditujukan untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan transparansi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik di tingkat desa. Tindakan ini konsisten dengan pandangan Sunaryo (2020) yang menekankan bahwa partisipasi politik masyarakat merupakan elemen penting bagi pengembangan desa yang fokus pada pemberdayaan dan demokratisasi. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik di bidang akademik maupun praktik dalam memahami hubungan antara politik dan kebijakan publik serta menawarkan solusi untuk memperbaiki pengelolaan pemerintahan desa.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam pengaruh faktor politik terhadap formulasi dan implementasi kebijakan publik di Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, serta menganalisis berbagai permasalahan yang muncul dalam proses pelaksanaannya. Faktor politik memiliki signifikansi yang substansial dalam menentukan arah kebijakan publik di tingkat lokal, mengingat interaksi antara aktor politik, pemerintah daerah, dan masyarakat sering kali menimbulkan dinamika yang kompleks dalam proses pengambilan keputusan. Hambatan dalam implementasi kebijakan desa dapat bersumber dari keterbatasan sumber daya, kompleksitas struktur birokrasi, serta perubahan regulasi yang berpotensi mengurangi kapasitas pemerintah desa dalam menerbitkan dokumen dan menjalankan program. Penelitian ini juga diarahkan untuk merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan transparansi dan memperluas partisipasi publik pada proses perumusan kebijakan. Transparansi dan partisipasi masyarakat dipandang sebagai determinan penting dalam memperkuat akuntabilitas serta kualitas tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, strategi yang menitikberatkan pada diseminasi informasi dan keterlibatan aktif warga diharapkan mampu memperkuat legitimasi kebijakan publik di tingkat desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik di Tingkat Desa

Kebijakan publik pada intinya merujuk kepada serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan isu-isu atau mencapai tujuan spesifik dalam komunitas. Pada level desa, kebijakan publik mempunyai ciri khas yang berbeda karena berada lebih dekat dengan masyarakat dan lebih rentan terhadap perubahan lokal. Menurut Winarno (2012), kebijakan publik mencakup segala tindakan atau ketidakaktifan pemerintah, alasan di balik pelaksanaan suatu kebijakan, serta hasil akhir yang diinginkan. Dalam konteks desa, pemimpin desa dan anggota perangkat desa berperan sebagai tokoh utama dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan warga. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa memberikan otoritas yang lebih besar kepada desa untuk mengelola dan mengatur kepentingannya sendiri. Hal ini menyebabkan proses penyusunan

kebijakan di tingkat desa menjadi lebih rumit karena melibatkan beragam pihak, termasuk kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat desa itu sendiri.

Faktor Politik dalam Kebijakan Desa

Politik erat kaitannya dengan pembuatan kebijakan publik, termasuk di level desa. Elemen politik adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi cara kebijakan dirumuskan, siapa saja yang terlibat, serta kepentingan mana yang diperjuangkan. Easton (1965) mengartikan politik sebagai proses alokasi nilai secara sah untuk suatu komunitas. Dalam lingkungan desa, politik meliputi persaingan kekuasaan, pembentukan aliansi, negosiasi antar kelompok berkepentingan, serta pengambilan keputusan secara bersama yang melibatkan berbagai pihak. Berbagai elemen politik yang memengaruhi kebijakan desa menurut sejumlah peneliti mencakup:

- a. Kepemimpinan Kepala Desa Gaya kepemimpinan yang dimiliki kepala desa sangat mempengaruhi kebijakan di desa. Penelitian oleh Widjaja (2003) menunjukkan bahwa kepala desa yang memiliki 7 legitimasi yang kuat dari masyarakat lebih berhasil dalam menerapkan kebijakan pembangunan desa.
- b. Dinamika Politik Lokal Interaksi antara kepala desa dengan BPD, kelompok masyarakat, dan tokoh-tokoh informal seperti tokoh agama atau tokoh adat berperan penting dalam proses politik di desa. Menurut Sutoro Eko (2014), dinamika politik lokal sering menjadi penentu apakah suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik atau menghadapi rintangan
- c. Partisipasi Politik Masyarakat Tingkat keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa dan forum pengambilan keputusan lainnya mencerminkan seberapa sehat kehidupan politik di desa. Penelitian oleh Antlov, Wetterberg, dan Dharmawan (2016) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa masih tergolong rendah di banyak lokasi karena minimnya akses informasi serta dominasi dari kelompok elit lokal.
- d. Konflik dan Kompetisi Politik Konflik kepentingan antar kelompok, persaingan dalam pemilihan kepala desa (Pilkades), dan ketegangan antara kepala desa dengan BPD sering menjadi penghambat dalam proses kebijakan. Nurdin dan Pettalongi (2018) mengidentifikasi bahwa konflik politik lokal dapat menghambat implementasi program-program pembangunan desa.

Proses Pembuatan Kebijakan Desa

Proses penetapan kebijakan di level desa terdiri dari serangkaian langkah yang mirip dengan gagasan dasar mengenai kebijakan publik. Anderson (2003) mengategorikan tahapan kebijakan ke dalam lima bagian: identifikasi isu, penyusunan kebijakan, penerimaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaian kebijakan. Di tingkatan desa, forum musyawarah desa (Musdes) berfungsi sebagai alat utama untuk menyusun kebijakan. Melalui Musdes, berbagai rekomendasi yang datang dari warga dibahas dan dipilih untuk

selanjutnya dicatat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Implementasi Kebijakan Desa dan Tantangannya

Implementasi kebijakan adalah tahap krusial yang menentukan berhasil tidaknya suatu kebijakan mencapai tujuannya. Van Meter dan Van Horn (1975) mengidentifikasi enam faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan: norma dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, komunikasi antar lembaga, karakteristik pelaksana, situasi sosial ekonomi serta politik, dan sikap pelaksana. Dalam konteks desa, pelaksanaan kebijakan sering kali menghadapi berbagai kendala seperti:

- a. Keterbatasan dalam sumber daya manusia dan keuangan.
- b. Kemampuan aparatur desa yang masih kurang.
- c. Koordinasi yang tidak efektif di antara berbagai pihak.
- d. Tolakan dari kelompok masyarakat tertentu.
- e. Intervensi politik dari pihak luar.

Akuntabilitas dan Transparansi dalam Kebijakan Desa

Akuntabilitas dan keterbukaan merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam pengelolaan pemerintahan desa yang efektif. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa tanggung jawab publik adalah kewajiban mereka yang memegang amanah untuk memberikan laporan, menyajikan informasi, dan mengungkapkan seluruh kegiatan yang merupakan tanggung jawab mereka kepada pihak pemberi amanah yang berhak meminta laporan tersebut. Dalam ranah politik desa, akuntabilitas menghadirkan tantangan unik, mengingat hubungan dekat antara pemerintah desa dan masyarakat yang dapat membentuk sistem patron-klien.

Studi Kasus Kebijakan Desa di Indonesia

Berbagai studi kasus tentang kebijakan desa di Indonesia memberikan gambaran tentang bagaimana faktor politik mempengaruhi proses kebijakan. Penelitian di berbagai daerah menunjukkan pola yang beragam:

- a. Di Jawa, penelitian menunjukkan pengaruh kuat dari budaya paternalistik dan dominasi elite lokal dalam proses kebijakan.
- b. Di luar Jawa, terutama di wilayah dengan sistem adat yang kuat, kebijakan desa sering kali harus mengakomodasi norma-norma adat di samping regulasi formal.
- c. Di daerah-daerah dengan sejarah konflik, faktor politik identitas dan etnisitas menjadi variabel penting dalam kebijakan desa.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengetahui bagaimana faktor politik memengaruhi proses kebijakan dari tahap perumusan hingga pelaksanaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Faktor Politik terhadap Kebijakan Publik di Desa Kertawinangun Kabupaten Cirebon

Pengaruh Faktor Politik terhadap Kebijakan Publik di Desa Kertawinangun Faktor politik memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan publik di tingkat desa, termasuk di Desa Kertawinangun:

- a. Kepemimpinan kepala desa menjadi faktor politik yang paling fundamental dalam menentukan arah kebijakan publik di desa. Sebagai pemimpin utama di desa, kepala desa memiliki peran penting dalam membentuk arah kebijakan yang akan dijalankan. Visi, misi, serta orientasi politik yang dimiliki kepala desa sangat mempengaruhi fokus pembangunan dan penyaluran anggaran desa, sehingga preferensi politik kepala desa akan tercermin dalam prioritas-prioritas program yang dilaksanakan.
- b. Dinamika hubungan antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan publik. BPD sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menyetujui kebijakan desa memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan kebijakan. Hubungan antara kepala desa dan BPD, terutama dalam aspek politik, bisa mempercepat atau memperlambat pelaksanaan kebijakan publik, tergantung pada tingkat keharmonisan dan kesamaan visi di antara keduanya.
- c. Pengaruh politik lokal dan nasional turut membentuk ruang gerak kebijakan di tingkat desa. Afiliasi kepala desa dengan partai tertentu dapat memengaruhi dukungan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, baik dalam bentuk bantuan dana maupun program pembangunan. Kebijakan dari tingkat kabupaten hingga provinsi memengaruhi ruang gerak kebijakan desa karena desa harus menyesuaikan dengan arahan dari pemerintah yang lebih tinggi. Selain itu, program pemerintah pusat yang diterapkan di desa juga dipengaruhi oleh faktor politik, terutama dalam hal prioritas dan mekanisme implementasinya.
- d. Partisipasi dan aspirasi masyarakat menjadi arena politik lokal yang menentukan arah kebijakan publik di desa. Proses musyawarah desa (Musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) menjadi tempat berlangsungnya politik lokal, di mana aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat dicari solusinya. Dalam forum-forum ini, berbagai kelompok kepentingan berusaha memperjuangkan usulan mereka agar masuk ke dalam program prioritas desa, sehingga terjadi negosiasi dan tawar-menawar politik di tingkat akar rumput.
- e. Alokasi dana desa menjadi objek keputusan politik yang sangat krusial dalam menentukan program-program yang akan dilaksanakan. Keputusan politik sangat memengaruhi cara Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk program-program yang menjadi prioritas. Pilihan politik mengenai sektor mana yang akan mendapat porsi

- anggaran lebih besar mencerminkan orientasi pembangunan dan kepentingan politik yang sedang dominan di desa tersebut.
- f. Jaringan politik dan pola patronase juga memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan publik di desa. Hubungan antar elit politik lokal dalam bentuk patron-klien berpengaruh besar terhadap distribusi sumber daya dan akses terhadap berbagai program pembangunan. Pola hubungan ini seringkali menentukan siapa yang mendapat manfaat lebih besar dari program-program pembangunan, dan dapat mempengaruhi efektivitas serta pemerataan pelaksanaan kebijakan publik di tingkat desa.

Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Akibat Pengaruh Politik

- a. Konflik Kepentingan Antar Elite Politik
Perbedaan kepentingan antara kepala desa, BPD, dan tokoh masyarakat dapat menimbulkan deadlock dalam pengambilan keputusan. Ketika elite politik memiliki agenda yang berbeda, kebijakan yang seharusnya menguntungkan masyarakat luas menjadi terhambat karena masing-masing pihak mempertahankan posisinya. Konflik ini sering mengakibatkan tertundanya program pembangunan atau bahkan pembatalan kebijakan yang sudah direncanakan.
- b. Polarisasi Politik Pasca Pemilihan
Setelah pemilihan kepala desa, desa sering mengalami perpecahan antara pendukung pemenang dan yang kalah. Kelompok yang kalah dalam kontestasi politik cenderung kurang kooperatif dalam mendukung program-program yang diinisiasi kepala desa terpilih. Polarisasi ini menciptakan resistensi terhadap kebijakan publik, meskipun kebijakan tersebut sebenarnya bermanfaat bagi masyarakat umum.
- c. Politisasi Alokasi Anggaran
Dana desa seringkali dialokasikan berdasarkan pertimbangan politik daripada kebutuhan riil masyarakat. Program-program yang menguntungkan basis pendukung politik tertentu mendapat prioritas lebih tinggi, sementara wilayah atau kelompok yang dianggap tidak mendukung cenderung terabaikan. Hal ini mengakibatkan ketimpangan distribusi manfaat pembangunan dan menurunkan efektivitas kebijakan.
- d. Lemahnya Check and Balance
Ketika hubungan antara kepala desa dan BPD terlalu dekat atau bahkan kolaboratif tanpa fungsi pengawasan yang memadai, maka mekanisme kontrol terhadap kebijakan menjadi lemah. Sebaliknya, jika hubungan keduanya antagonistik, setiap kebijakan akan sulit mendapat persetujuan. Kedua kondisi ekstrem ini sama-sama menghambat pelaksanaan kebijakan yang efektif.

- f. Intervensi Politik dari Tingkat Atas
Tekanan politik dari pemerintah kabupaten atau tokoh politik tingkat atas dapat memaksa desa untuk mengimplementasikan program tertentu yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan lokal. Intervensi ini mengurangi otonomi desa dalam menentukan prioritas pembangunannya sendiri dan dapat mengalihkan sumber daya dari program yang lebih dibutuhkan masyarakat.
- g. Politik Identitas dan Primordialisme
Sentimen berbasis agama, suku, atau kelompok tertentu dapat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kebijakan. Kebijakan yang diusulkan oleh kelompok tertentu mungkin ditolak bukan karena substansinya buruk, tetapi karena berasal dari kelompok yang berbeda. Politik identitas ini menciptakan fragmentasi sosial yang menghambat kohesi dalam pelaksanaan kebijakan.
- h. Praktik Patronase dan Nepotisme
Sistem patron-klien yang kuat menyebabkan distribusi manfaat pembangunan tidak merata dan cenderung menguntungkan kelompok tertentu saja. Dalam implementasi kebijakan, posisi-posisi strategis atau kontrak proyek sering diberikan kepada kerabat atau pendukung politik, bukan berdasarkan kompetensi. Praktik ini menurunkan kualitas pelaksanaan kebijakan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Langkah Strategis yang Dilakukan untuk Memperkuat Transparansi dan Partisipasi Publik di Desa Kertawinangun

- a. Penguatan transparansi dan partisipasi masyarakat di Desa Kertawinangun memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terus-menerus. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah menyediakan sistem informasi desa yang terhubung dan digital. Desa Kertawinangun perlu membuat platform informasi yang bisa diakses oleh seluruharganya, yang berisi data tentang rencana pembangunan, anggaran desa, pelaksanaan program, serta laporan pertanggungjawaban secara real-time. Website desa atau aplikasi ponsel bisa jadi sarana untuk membagikan dokumen penting seperti APBDes, RKP Desa, dan laporan kegiatan. Dengan digitalisasi informasi, masyarakat bisa mengakses data kapan saja dan di mana saja, sehingga transparansi bisa terjaga terus-menerus tanpa dibatasi oleh waktu atau tempat.
- b. Langkah berikutnya adalah meningkatkan kemampuan Badan Permusyawaratan Desa agar fungsi pengawasan bisa berjalan efektif. Anggota BPD harus mendapat pelatihan dan bimbingan secara rutin agar memahami tugas dan wewenangnya dalam mengawasi pemerintahan desa. Mereka harus mampu membaca anggaran, memahami peraturan, serta mengawasi program yang dijalankan. Jika BPD memiliki kapasitas yang baik, fungsi kontrol dan keseimbangan bisa berjalan optimal. Dengan demikian, kebijakan yang diambil oleh kepala desa benar-benar untung bagi seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Pelatihan bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten, universitas, atau lembaga yang berpengalaman dalam tata kelola desa.

- c. Memperkuat forum musyawarah desa adalah strategi penting untuk meningkatkan partisipasi publik yang inklusif. Musyawarah desa dan Musrenbang harus diikuti oleh seluruh elemen masyarakat, bukan hanya orang-orang tertentu yang selama ini mendominasi. Pemerintah desa harus memastikan bahwa perempuan, pemuda, kelompok marginal, dan kelompok ekonomi lemah terwakili dalam setiap forum pengambilan keputusan. Jadwal musyawarah harus diumumkan jauh-jauh hari, melalui berbagai media seperti pengeras suara masjid, papan pengumuman, media sosial, hingga grup WhatsApp RT/RW. Dalam pelaksanaannya, perlu ada fasilitator yang netral untuk memastikan semua suara diperdengarkan, tanpa ada dominasi dari kelompok tertentu yang bisa menyela suara kelompok lain.
- d. Pembentukan kelompok pemantau yang bebas dari kepentingan pihak tertentu bisa menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif. Masyarakat dapat membentuk kelompok pemantau yang terdiri dari tokoh masyarakat, aktivis desa, pemuda, serta perwakilan dari berbagai komunitas. Tugas kelompok ini adalah mengawasi pelaksanaan program pembangunan, mengumpulkan masukan dari masyarakat, serta melaporkan temuan kepada pemerintah desa atau publik. Kebebasan kelompok ini harus dijamin agar bisa menjalankan fungsi pengawasan dengan objektif. Kelompok pemantau juga bisa berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menyampaikan aspirasi serta keluhan.
- e. Penyelenggaraan dialog dengan masyarakat secara rutin adalah cara penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan warga. Pemerintah Desa Kertawinangun sebaiknya mengadakan forum warga secara teratur, misalnya setiap tiga bulan sekali, untuk membahas perkembangan pembangunan dan menerima masukan dari warga. Forum ini berbeda dengan Musdes yang biasanya lebih formal, karena lebih santai dan memungkinkan diskusi dua arah tanpa aturan yang terlalu ketat. Kepala desa dan tim desa dapat memberikan laporan tentang progres program, kendala yang dihadapi, dan rencana ke depan, sementara warga diberi ruang untuk bertanya, memberi masukan, serta mengkritik tanpa merasa takut.
- f. Menggunakan papan informasi publik di tempat yang strategis merupakan cara sederhana namun efektif untuk meningkatkan transparansi. Desa Kertawinangun bisa memasang papan informasi atau baliho di balai desa, masjid, pasar, dan jembatan utama yang sering dilewati warga. Papan informasi ini harus berisi data penting, seperti rincian APBDes yang terbagi per bidang, daftar program yang sedang berjalan beserta perkembangannya, jadwal kegiatan, dan kontak pengaduan yang mudah dihubungi. Informasi perlu diperbarui secara berkala setidaknya sebulan sekali dan ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, bukan bahasa resmi yang rumit. Visualisasi data dalam bentuk infografis atau diagram akan lebih mudah dipahami daripada tabel

angka, terutama untuk warga dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

- g. Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan politik dan literasi kebijakan publik adalah investasi jangka panjang yang sangat penting. Warga Desa Kertawinangun perlu diberikan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pemerintahan desa, cara menyampaikan aspirasi secara efektif, mekanisme pengawasan yang bisa mereka lakukan, serta cara membaca dan memahami anggaran desa. Program pendidikan ini bisa dilakukan melalui sosialisasi ke dusun-dusun, diskusi kelompok, atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau organisasi nirlaba.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Faktor politik memainkan peran krusial dalam pembentukan dan implementasi kebijakan di Desa Kertawinangun, di mana gaya kepemimpinan kepala desa, hubungan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta keterlibatan partai politik secara signifikan memengaruhi arah pembangunan dan distribusi program. Dinamika politik lokal, termasuk kerja sama atau konflik antar pemimpin, langsung berdampak pada keberhasilan dan keadilan pembangunan. Namun, pengaruh ini sering kali menimbulkan masalah seperti konflik kepentingan, politisasi anggaran, kurangnya transparansi, pemanfaatan kekuasaan, intervensi eksternal, dan politik identitas, yang menghambat pembangunan yang inklusif.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang terencana guna mengatur pengaruh politik secara demokratis, memastikan kebijakan desa lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat luas daripada kelompok atau individu tertentu. Implementasi mekanisme pengawasan yang ketat, peningkatan partisipasi masyarakat, dan reformasi institusi lokal dapat menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi ini dalam konteks desa lainnya.

PENELITIAN LANJUTAN

Untuk meningkatkan tata kelola desa yang lebih baik, pemerintah Desa Kertawinangun perlu memperkuat transparansi melalui pembukaan akses informasi publik secara digital dan melalui papan pengumuman, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan kebijakan desa. Selain itu, musyawarah desa harus mendorong partisipasi semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok rentan, untuk memastikan kebijakan yang lebih adil dan inklusif bagi semua pihak. Pembentukan kelompok pengawas desa yang independen dan netral juga diperlukan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan yang transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akhirnya, peningkatan literasi politik melalui pendidikan yang disediakan oleh pemerintah desa dan lembaga terkait akan memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami dan aktif dalam pengawasan kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Antlov, H. (2003). Village Government and Rural Development in Indonesia: The New Democratic Framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193-214.
- Antlov, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161-183.
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193-211.
- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. New York: John Wiley.
- Eko, S., & Pratikno. (2013). *Kompleksitas Perencanaan Pembangunan Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nurcholis, H. (2017). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nuridin, N., & Pettalongi, A. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Buluri Kecamatan Uluweng Kabupaten Bone. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 51-63.
- Sutoro Eko. (2014). *Desa Baru, Negara Lama: Tinjauan Kritis Soal UU Desa*. Jakarta: Yayasan Tifa.
- Syahyuti. (2014). Peran Strategis BPD dalam Demokrasi Desa. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 12(1), 53-70.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
- Vel, J. A. C., & Bedner, A. W. (2015). Decentralisation and Village Governance in Indonesia: The Return to the Nagari and the 2014 Village Law. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(3), 493-507.
- Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Zakaria, R. Y. (2004). *Abih Tandeh: Masyarakat Desa di Bawah Rezim Orde Baru*. Jakarta: Elsam.